

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kabupaten Barito Utara



2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Kabupaten Barito Utara



2019

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA 2019

ISBN : 978-602-6527-42-4
No. Publikasi : 62050.2008
Katalog : 4102002.6205
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 59 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Tata Letak, Gambar Kulit, dan Infografis:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Ilustrasi Sampul Kulit:

freepik.com

Sumber Ilustrasi Infografis:

freepik.com

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara

Dicetak oleh:

Amadeus Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Ahmad Nasrullah

Penyusun : Anindya Pusparatri

Tata Letak : Anindya Pusparatri

Gambar Kulit : Anindya Pusparatri

Infografis : 1. Anindya Pusparatri
2. Endang Yoanna Br Sembiring

Penyunting : Yulfi Noor Jayantie

KATA PENGANTAR

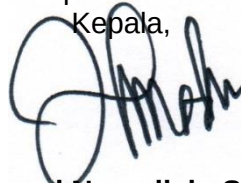
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan publikasi **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSA (IPM) KABUPATEN BARITO UTARA 2019** telah selesai sebagai bagian dari pelayanan data kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara 2019** ini memuat informasi mengenai capaian pembangunan manusia Kabupaten Barito Utara secara *series* dengan menggunakan metodologi penghitungan IPM yang terbaru. Dalam publikasi ini juga memuat analisis data pendukung seperti kondisi sosial ekonomi Kabupaten Barito Utara sebagai informasi tambahan.

Publikasi ini tentu masih mengandung berbagai keterbatasan. Kritik dan saan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang. Kritik dan saran dapat dialamatkan ke bps6205@bps.go.id. Kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan publikasi ini kami mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat sebagai bahan rujukan penelitian atau pun bahan evaluasi kinerja pemerintah.

Muara Teweh, Mei 2020
BPS Kabupaten Barito Utara
Kepala,



Ahmad Nasrullah, SST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	3
Tujuan	4
Ruang Lingkup dan Sumber Data	5
BAB II METODOLOGI	7
Konsep Indeks Pembangunan Manusia	9
Perjalanan Pengukuran Pembangunan Manusia	9
Penghitungan IPM.....	11
Manfaat IPM	16
BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI	17
Kesehatan.....	19
Pendidikan.....	23
Ekonomi	30
BAB IV PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BARITO UTARA	35
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	37
Dimensi Pengetahuan	38
Dimensi Standar Hidup Layak	39
Indeks Pembangunan Manusia	40
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	43
Kesimpulan.....	45
Rekomendasi.....	46

DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM.....	15
Tabel 3.1 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Utara, 2014, 2018, 2019.....	20
Tabel 3.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Terakhir 2 Tahun yang Lalu atau Kurang menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Barito Utara, 2018-2019 (persen)	21
Tabel 3.3 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara, 2018-2019.....	33
Tabel 3.4 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2019	34
Tabel 4.1 IPM Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah beserta Komponennya, 2019	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	10
Gambar 3.1 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2019.....	20
Gambar 3.2 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Utara, 2016, 2017, dan 2019	23
Gambar 3.3 Rasio Murid-Guru di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2015/2016-2019/2020	25
Gambar 3.4 Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2015/2016-2019/2020	26
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018-2019	27
Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019	28
Gambar 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Utara (Persen), 2015-2019	29
Gambar 3.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010:100 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2015-2019	31
Gambar 4.1 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun), 2010-2019.....	37
Gambar 4.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara (Tahun), 2010-2019	38
Gambar 4.3 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah/Tahun), 2010-2019.....	39
Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2019.....	40
Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018-2019	51
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015–2019	52
Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015–2019	53
Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019	54
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019	55
Lampiran 6. Angka Harapan Hidup saat Lahir Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun), 2010-2019	56
Lampiran 7. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara (Tahun), 2010-2019	57
Lampiran 8. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah/Tahun), 2010-2019	58
Lampiran 9. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2019	59

Bab 1

Pendahuluan



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dua fungsi dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek atau pelaksana pembangunan dan sebagai objek atau penerima hasil pembangunan.

Konsep ini sedikit berbeda dengan konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke pembahasan mengenai tujuan akhir pembangunan. *United Nation Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan manusia bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya pada dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat serta pengetahuan dan kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi tersebut direpresentasikan oleh indikator-indikator.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, digunakanlah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Berawal dari konsep pembangunan manusia, IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and*

healthy life), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM digunakan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai gambaran umum kondisi daerah, khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia. Analisis IPM dan kajiannya digunakan untuk menentukan strategi, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan sumber daya manusia yang telah dicapai pemerintah daerah selama satu periode. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik sebagai pelopor data statistik berupaya untuk menganalisis IPM tahun 2019 guna mencapai manfaat tersebut. Analisis akan ditekankan pada pencapaian dalam bentuk *series* baik dari angka IPM, komponen penyusun, dan variabel pendukung berupa gambaran umum kondisi daerah.

Tujuan

Penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 memiliki tujuan sebagai berikut.

- Menyediakan informasi beserta pembahasan mengenai kondisi sosial ekonomi Kabupaten Barito Utara, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
- Menyediakan informasi beserta pembahasan mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara;
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode tertentu serta perkembangan metode yang digunakan;
- Sebagai bahan perencanaan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
- Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara 2019 mencakup kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan isu pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sumber data utama yang digunakan dalam analisis adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain itu terdapat referensi lain dalam analisis publikasi ini seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan data sekunder dari berbagai dinas/instansi terkait.

Bab 2

Metodologi



METODOLOGI

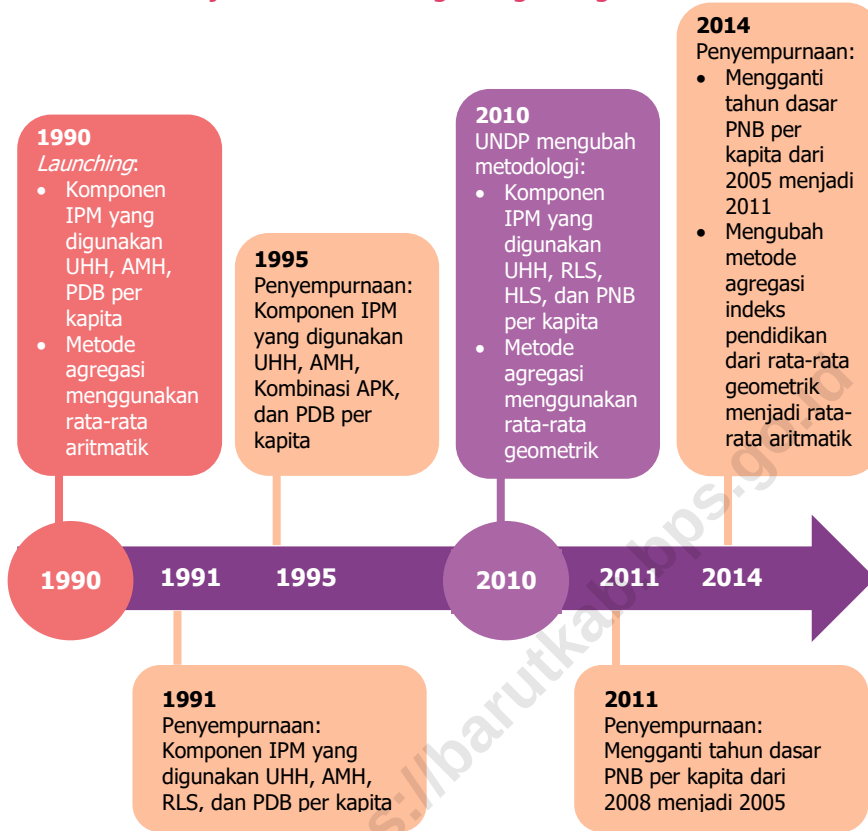
Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia suatu wilayah. IPM dikenalkan oleh UNDP pada *Human Development Report 1990*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki indikator sebagai komponen penyusun indeks tiap dimensi.

Perjalanan Pengukuran Pembangunan Manusia

Pada laporan pertamanya, UNDP menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) atau umur harapan hidup saat lahir untuk dimensi umur panjang dan sehat; indikator Angka Melek Huruf (AMH) untuk dimensi pengetahuan; dan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita untuk dimensi standar layak hidup. Ketiga dimensi tersebut dibentuk menjadi sebuah indeks komposit yang menggunakan rata-rata aritmatika. Setahun setelah perilisan laporan pertama, UNDP menambahkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada dimensi pengetahuan. Pada 1995, indikator RLS diganti menjadi indikator Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK).

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan

UHH : Umur Harapan Hidup
AMH : Angka Melek Huruf
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar
HLS : Harapan Lama Sekolah
PNB : Produk Nasional Bruto

UNDP terus-menerus melakukan penyempurnaan pada pengukuran pembangunan manusia ini. Pada 2010, UNDP melakukan penyempurnaan yaitu dengan mengganti indikator pada dimensi pengetahuan menjadi indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Selain itu indikator PDB per kapita yang sebelumnya digunakan pada dimensi standar layak hidup, diganti menjadi indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM juga mengalami penyempurnaan, yaitu dari menggunakan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Penyempurnaan kembali dilakukan pada tahun 2014 dengan mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik

menjadi rata-rata aritmatik. Pengukuran kecepatan perubahan IPM juga mengalami perubahan dari menggunakan reduksi *shortfall* menjadi pertumbuhan aritmatik.

Perubahan metodologi IPM dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkala mengikuti perkembangan yang terjadi secara global. Alasan-alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah sebagai berikut.

- Beberapa indikator sudah tidak dapat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar daerah di Indonesia sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada metode yang digunakan oleh UNDP. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, serta indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk dimensi pengetahuan. Sementara itu, untuk dimensi standar hidup layak, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP).

Penghitungan IPM

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Indikator yang menyusun dimensi umur panjang dan hidup sehat adalah Umur Harapan Hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks yang terbentuk dari dimensi umur panjang dan hidup sehat adalah indeks kesehatan. Indeks kesehatan dibentuk dengan menghitung nilai maksimum dan minimum angka harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka maksimum adalah 85 tahun dan minimum 20 tahun. Rumus indeks kesehatan adalah sebagai berikut.

$$I_{Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} \quad (1)$$

Keterangan:

UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir

Dimensi Pengetahuan

Indikator yang menyusun dimensi pengetahuan adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Batasan lama sekolah untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak.

UNDP menentukan nilai minimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 0 tahun dan nilai tertinggi adalah 15 tahun. Untuk rumus rata-rata lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut.

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i \quad (2)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (3)$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i : Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun ke atas

n : jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Indikator yang juga digunakan untuk menyusun dimensi pengetahuan adalah Harapan lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan Harapan Lama Sekolah dikhususkan untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbasis jenjang.

UNDP menentukan nilai minimum untuk harapan lama sekolah adalah 0 tahun dan nilai maksimum 18 tahun. Untuk rumus harapan lama sekolah adalah sebagai berikut.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \quad (4)$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

FK : Faktor koreksi pesantren

Indeks yang terbentuk dari dimensi pengetahuan adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan dihitung dengan metode rata-rata aritmatik dari indeks RLS dan HLS. Rumus indeks pendidikan adalah sebagai berikut.

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2} \quad (5)$$

Dimensi Standar Hidup Layak

UNDP menggunakan indikator PNB per kapita sebagai indikator penyusun dimensi standar hidup layak. Namun, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP). Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Hukum Engel mengatakan bahwa semakin tinggi

pendapatan, semakin rendah persentase pengeluaran makanan. Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran pola pengeluaran ke pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Penghitungan pengeluaran per kapita adalah sebagai berikut.

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP} \quad (6)$$

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100 \quad (7)$$

$$PPP = \sum_{i=1}^m \left(\frac{p_i}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (8)$$

Keterangan:

Y^{**} : Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Y^* : Pengeluaran per kapita harga konstan

Y : pengeluaran per kapita setahun

IHK : Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012

PPP : Paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity*

p_{ij} : harga komoditas i pada wilayah j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Untuk penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok baik dari komoditas makanan maupun non makanan. Data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor.

Batas maksimum dan minimum daya beli untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan BPS adalah Rp26.572.352 dan Rp1.007.436. Batas maksimum daya beli merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025. Sedangkan untuk daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 yaitu di Tolikara, Papua. Rumus indeks pengeluaran adalah sebagai berikut.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (9)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	20	85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1 007 436	26 572 352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \quad (10)$$

IPM yang merupakan indikator jangka panjang, perlu dimaknai dengan hati-hati. Salah satu cara untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah adalah dengan melihat kecepatan IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.

Selain kecepatan IPM, kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat pula dari status IPM suatu wilayah pada suatu periode. Level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode digambarkan melalui status IPM yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

$IPM \geq 80$	: Sangat tinggi
$70 \leq IPM < 80$	: Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	: Sedang
$IPM < 60$	: Rendah

Manfaat IPM

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan, khususnya dari objek pembangunan itu sendiri yaitu manusia. Manfaat dari IPM adalah sebagai berikut.

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI.
- IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
- Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID).

Bab 3

Kondisi Sosial Ekonomi



KONDISI SOSIAL EKONOMI

Kesehatan

Manusia adalah tujuan akhir pembangunan. Maka dari itu, kesehatan manusia perlu dijaga dan ditingkatkan demi menjaga kualitas dari sumber daya dan kualitas kehidupannya. Jika derajat kesehatan manusia di suatu wilayah baik maka wilayah tersebut menuju ke arah yang lebih baik.

Upaya peningkatan derajat kesehatan manusia dilakukan dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Kesadaran pentingnya hidup sehat ini menjadi dasar peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, peran pemerintah dalam pengelolaan kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan memadainya fasilitas kesehatan akan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pembangunan kualitas kesehatan salah satunya dapat dilakukan dari penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan lebih terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.

Terdapat penurunan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Penurunan terjadi pada tersedianya puskesmas dan puskesmas pembantu pada 2019. Hal ini cukup disayangkan karena masyarakat menjadi kekurangan opsi dalam memeriksakan kondisi kesehatannya, khususnya masyarakat yang berdomisili di desa yang infrastrukturnya kurang memadai.

Tabel 3.1 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Utara, 2014, 2018, 2019

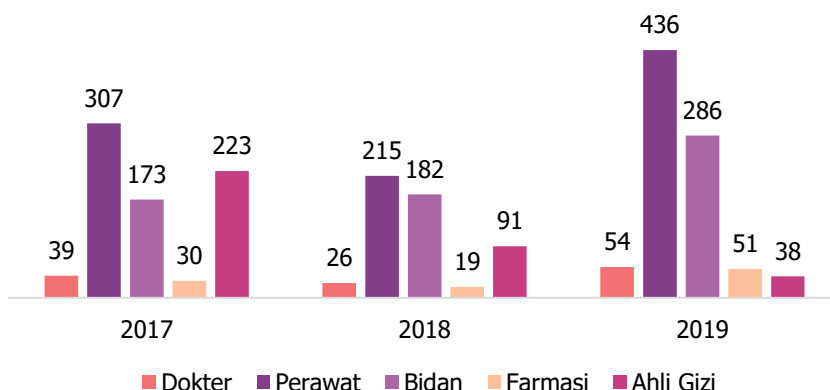
Tahun	Fasilitas Kesehatan					
	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	1	1	16	80	3	2
2018	1	-	21	83	4	4
2019	1	-	19	82	7	4

Sumber: Barito Utara Dalam Angka 2020, BPS

Fasilitas yang bertambah pada 2019 adalah poliklinik. Poliklinik yang baru terbangun di tahun 2019 adalah di kecamatan Teweh Selatan sebanyak 2 poliklinik dan di kecamatan Lahei sebanyak 1 poliklinik. Poliklinik yang semakin tersebar ke desa-desa memudahkan masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya.

Selain penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan juga menjadi bentuk upaya peningkatan derajat kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan yang tercukupi akan memudahkan masyarakat untuk melakukan konsultasi maupun pengobatan atas keluhan yang didera. Tidak hanya kebutuhan tenaga kesehatan yang mencukupi, tenaga kesehatan yang berkualitas juga dibutuhkan agar pelayanan kesehatan yang didapat oleh masyarakat dapat lebih terjamin kualitasnya.

Gambar 3.1 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Utara, 2017-2019



Sumber: Barito Utara Dalam Angka 2018-2020, BPS

Secara umum, terjadi kenaikan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Utara pada 2019. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tenaga keperawatan yang naik dari 215 tenaga menjadi 436 tenaga. Selain itu, tenaga kesehatan yang juga mengalami kenaikan jumlah tenaga adalah bidan sebanyak 104 tenaga, farmasi sebanyak 32 tenaga, dan dokter sebanyak 28 tenaga. Penurunan tenaga kesehatan hanya terjadi pada ahli gizi yaitu turun sebanyak 53 tenaga. Peningkatan tenaga kesehatan yang secara umum terjadi diharapkan akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin memeriksa kehamilan maupun melahirkan. Peningkatan jumlah bidan yang sangat tinggi diharapkan dapat menekan kematian ibu dan bayi saat melahirkan.

Daya Tahan Untuk Bertahan

Kemampuan untuk bertahan pada saat melahirkan dinilai dipengaruhi oleh penolong persalinan. Penolong persalinan penting sebagai tolok ukur kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan, baik kesehatan ibu maupun bayi. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun tradisional dan lainnya karena ilmu akademis yang didapat tenaga kesehatan lebih terjamin.

Tabel 3.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Anak Terakhir 2 Tahun yang Lalu atau Kurang menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Barito Utara, 2018-2019 (persen)

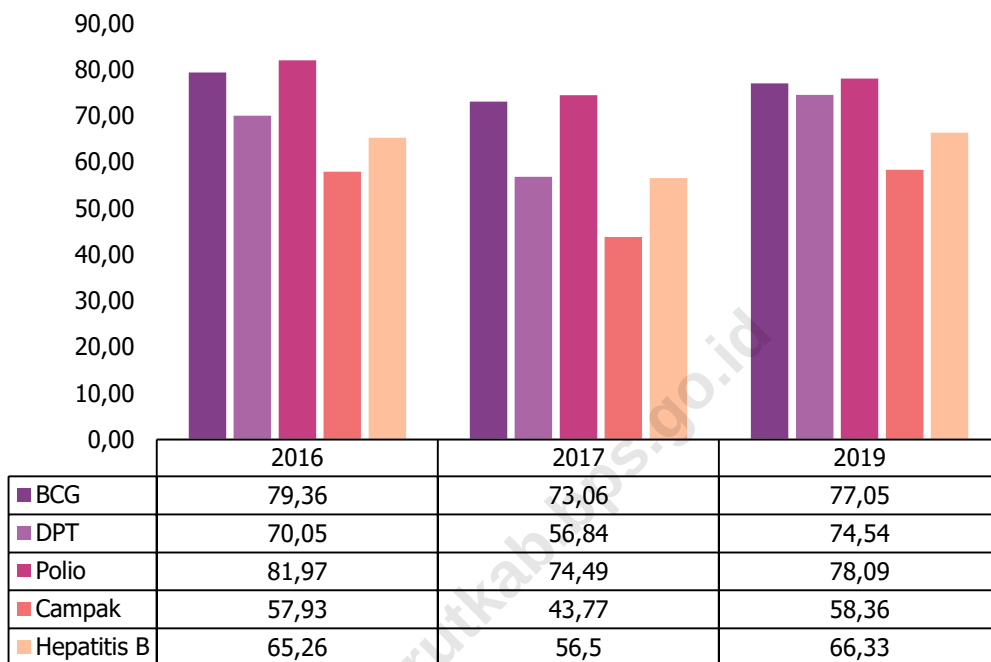
Penolong Persalinan	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	88,03	84,45
Dokter	20,74	21,58
Bidan	67,28	62,36
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00	0,51
Bukan Tenaga Kesehatan	11,97	15,55
Dukun Tradisional	11,97	15,55
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2019, BPS

Di Kabupaten Barito Utara, terjadi penurunan persentase perempuan melahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan pada 2019 dari 88,03 persen menjadi 84,45 persen. Persentase tertinggi adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga bidan yaitu sebesar 62,36 persen pada 2019. Untuk persalinan yang ditolong oleh dukun persalinan meningkat pada 2019 dari 11,97 persen menjadi 15,55 persen. Adanya kesulitan akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai membuat masyarakat beralih untuk melahirkan dengan ditolong oleh dukun tradisional.

Untuk menjaga daya tahan bayi, diperlukan juga memberikan imunisasi untuk bayi. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi menjelaskan imunisasi sebagai suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jenis imunisasi yang wajib diterima oleh balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B.

Gambar 3.2 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Barito Utara, 2016, 2017, dan 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2019, BPS

Pada 2019 terjadi peningkatan persentasi balita yang diimunisasi pada semua jenis imunisasi. Peningkatan persentase terbesar terjadi pada imunisasi DPT, dari 56,84 persen pada 2017 menjadi 74,54 persen pada 2019. Peningkatan yang terjadi pada semua jenis imunisasi menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi bagi kekebalan tubuh balita sekaligus menghindari resiko kematian anak.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan menjadi dasar bagi manusia untuk memperoleh kualitas hidup yang terjamin. Tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menjamin kualitas hidup yang baik di masa depan.

Pendidikan menjadi jalan untuk mengembangkan kemampuan dalam diri manusia. Berkembangnya kemampuan masyarakat melalui pendidikan

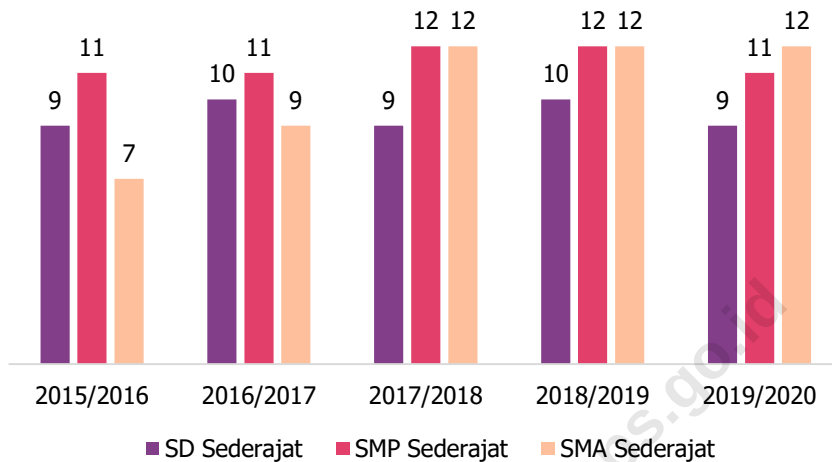
menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia meningkat. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diharapkan dapat mengenyam pendidikan.

Strategi pembangunan pendidikan nasional berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; serta peningkatan pembiayaan. Upaya-upaya pemerintah untuk mencapai strategi tersebut dapat dilakukan dari segi partisipasi sekolah.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan pelayanan pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkualitas dapat dilihat salah satunya melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru merupakan rata-rata jumlah murid per guru pada jenjang pendidikan tertentu di tahun ajaran tertentu. Indikator rasio murid-guru dapat menggambarkan beban kerja yang diemban seorang guru dalam mengajar dan mendidik serta menggambarkan mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar beban seorang guru dalam melakukan pengajaran dan pengawasan terhadap murid sehingga mutu pengajaran akan semakin rendah. Yang diharapkan dari indikator ini adalah nilai rasio murid-guru yang rendah. Hal ini dimaksudkan agar seorang guru lebih memperhatikan murid-murid pada kelas yang lebih kecil sehingga diharapkan mutu pengajaran akan lebih baik.

Gambar 3.3 Rasio Murid-Guru di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2015/2016-2019/2020



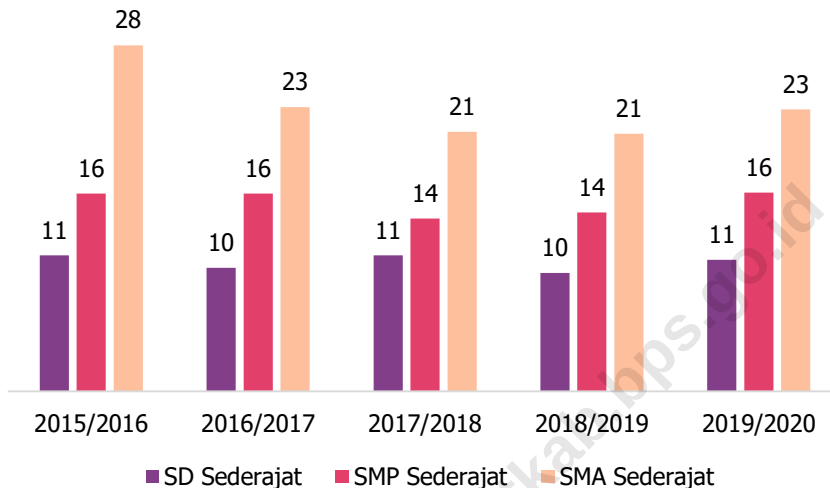
Sumber: Barito Utara Dalam Angka, BPS

Pada tahun ajaran 2019/2020, terjadi penurunan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat, yaitu menjadi sebesar 9 pada jenjang SD dan 11 pada jenjang SMP. Nilai rasio 11 memiliki interpretasi yaitu seorang guru mengajar atau mendidik sebanyak 11 orang murid. Nilai ini menurun dari sebelumnya senilai 10 untuk jenjang pendidikan SD sederajat dan 12 untuk jenjang pendidikan SMP sederajat pada tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, pada jenjang pendidikan SMA tetap pada nilai 12. Penurunan rasio murid-guru pada jenjang SD dan SMP menunjukkan bahwa terjadi penurunan beban guru untuk memberikan pengajaran dan pengawasan terhadap murid. Diharapkan mutu pengajaran yang diberikan guru semakin baik.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pelayanan pendidikan adalah rasio guru-sekolah. Rasio guru-sekolah adalah perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu di tahun ajaran tertentu. Rasio guru-sekolah dapat digunakan untuk melihat apakah terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga pengajar di sekolah pada suatu daerah. Semakin rendah nilai rasio, semakin terbatas jumlah

tenaga pengajar. Sebaliknya, semakin tinggi nilai rasio, kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar semakin tinggi.

Gambar 3.4 Rasio Guru-Sekolah di Kabupaten Barito Utara, Tahun Ajaran 2015/2016-2019/2020



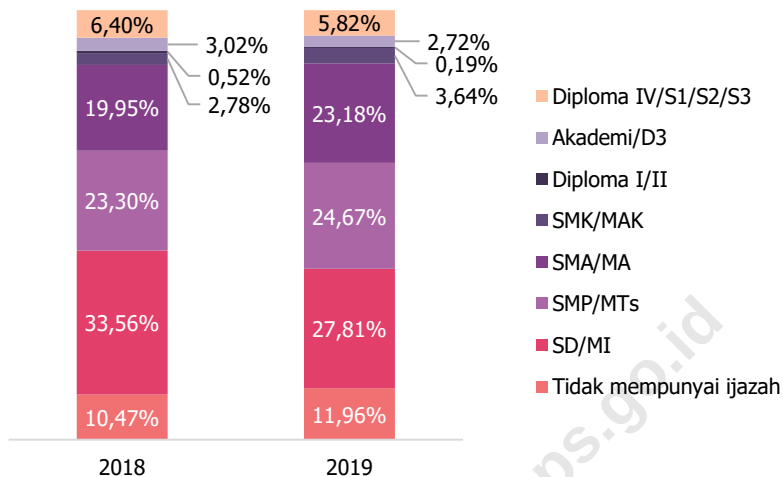
Sumber: Barito Utara Dalam Angka, BPS

Pada tahun ajaran 2019/2020, terjadi kenaikan nilai rasio guru-sekolah pada semua jenjang pendidikan, yaitu menjadi nilai rasio 11 pada jenjang SD, 16 pada jenjang SMP, dan 23 pada jenjang SMA. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai rasio guru-sekolah semakin tinggi. Hal ini disebabkan jumlah sekolah yang semakin sedikit pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian, keterampilan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Hal tersebut dapat digambarkan salah satunya melalui jenjang pendidikan yang ditamatkan. Orang yang menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dianggap memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta keterampilan dan keahlian yang tinggi. Dengan dimilikinya pengetahuan yang luas serta keterampilan dan keahlian yang tinggi, peluang seseorang untuk bekerja diharapkan menjadi lebih besar.

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018-2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2019, BPS

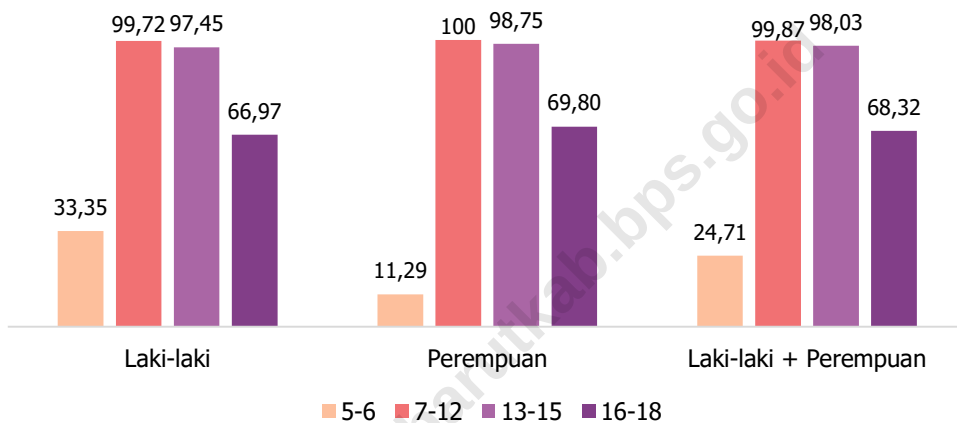
Pada 2019, penduduk usia 15 tahun ke atas sebagian besar merupakan tamatan SD/MI, yakni mencapai 27,81 persen, turun dari tahun 2018 yaitu mencapai 33,56 persen. Penurunan juga terjadi tidak hanya pada tamatan SD/MI, tetapi juga pada penduduk tamatan Diploma IV/S1/S2/S3, Akademi/D3, dan Diploma I/II. Di samping itu, terjadi kenaikan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTs menjadi 24,67 persen, SMA/MA menjadi 23,18 persen, SMK/MAK menjadi 3,64 persen, dan penduduk yang tidak mempunyai ijazah menjadi 11,96 persen.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dari berbagai jenjang dan kelompok umur. Indikator tingkat partisipasi sekolah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah menggunakan kedua indikator ini untuk mengambil kebijakan pendidikan terkait penyerapan anak didik dan upaya agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua penduduk yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, jalur pendidikan nonformal yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan dalam penghitungan indikator.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara (Persen), 2019



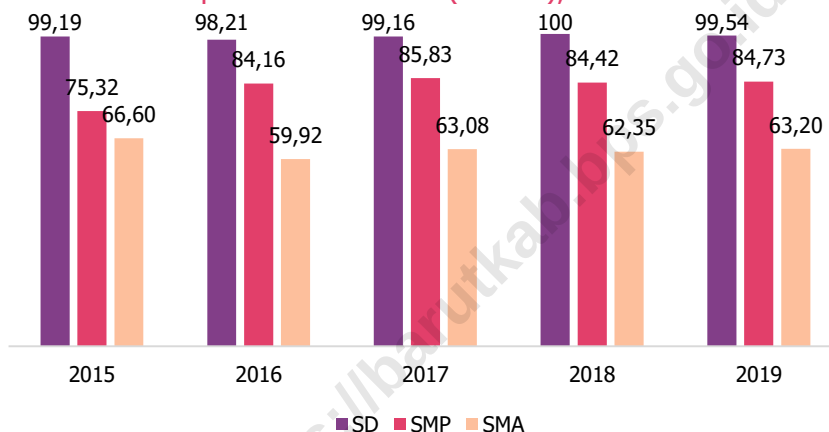
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2019, BPS

Pada 2019, kelompok umur 7-12 tahun memiliki Angka Partisipasi Sekolah yang paling tinggi, yaitu mencapai 99,87 persen. Angka ini diikuti oleh kelompok umur 13-15 tahun yang mencapai 98,03 persen, kelompok umur 16-18 tahun yang mencapai 68,32 persen, dan kelompok umur 5-6 tahun yang mencapai 24,71 persen. Angka 68,32 persen menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari 100 penduduk usia 16,18 tahun, terdapat 68 penduduk yang masih bersekolah. Hal ini menandakan bahwa cukup banyak penduduk yang putus sekolah pada usia tersebut.

Menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan secara umum pada 2019 lebih baik daripada APS penduduk laki-laki. Pada kelompok usia 7-12 APS penduduk perempuan sudah mencapai 100 persen. Rendahnya APS penduduk laki-laki khususnya pada kelompok umur 16-18 tahun menunjukkan cukup banyak laki-laki yang memutuskan untuk berhenti bersekolah pada umur tersebut.

Selain Angka Partisipasi Sekolah, indikator tingkat partisipasi sekolah lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap kelompok umur tersebut. APM yang bernilai 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sama seperti APS, jalur pendidikan nonformal yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan.

Gambar 3.7 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Utara (Persen), 2015-2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, BPS

Angka Partisipasi Murni tahun 2019 secara umum mengalami fluktuasi di tiap jenjang pendidikan dari tahun 2015. Untuk jenjang pendidikan SD, terjadi peningkatan APM dari 99,19 persen pada tahun 2015, menjadi 100 persen di tahun 2018, kemudian turun lagi di tahun 2019 menjadi 99,54 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP, terjadi peningkatan APM dari 75,32 persen pada tahun 2015 menjadi 84,73 persen pada tahun 2019. APM SMA yang mencapai 66,60 persen pada 2015, turun menjadi 63,20 persen pada 2019. APM 63,20 persen berarti dari setiap 100 penduduk kelompok umur 16-18 tahun atau setara jenjang pendidikan SMA hanya terdapat 63 penduduk yang bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan SMA. Hal ini berarti bahwa masih banyak penduduk yang menunda bersekolah, tidak naik kelas, lulus lebih cepat, atau berhenti bersekolah.

Ekonomi

Melihat kemajuan pembangunan manusia sama saja melihat tingkat kesejahteraan kehidupan manusia itu sendiri. Membbaiknya tingkat kesejahteraan manusia mendukung tercapainya kualitas hidup yang layak. Kualitas atau standar hidup layak berarti mampu secara finansial untuk suatu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, termasuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, jaminan kesehatan, dan pendidikan untuk seluruh anggota rumah tangga.

Menjamin anggota rumah tangga mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan mutu pendidikan yang baik sama saja memberi jaminan jangka panjang anggota rumah tangga menjadi SDM yang berkualitas di masa depan. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan akan menjamin daya beli yang mencukupi dari setiap anggota rumah tangga, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Daya beli masyarakat yang tinggi adalah indikator masyarakat mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan sehari-hari, yang berarti kesejahteraan masyarakat secara finansial cukup terjamin.

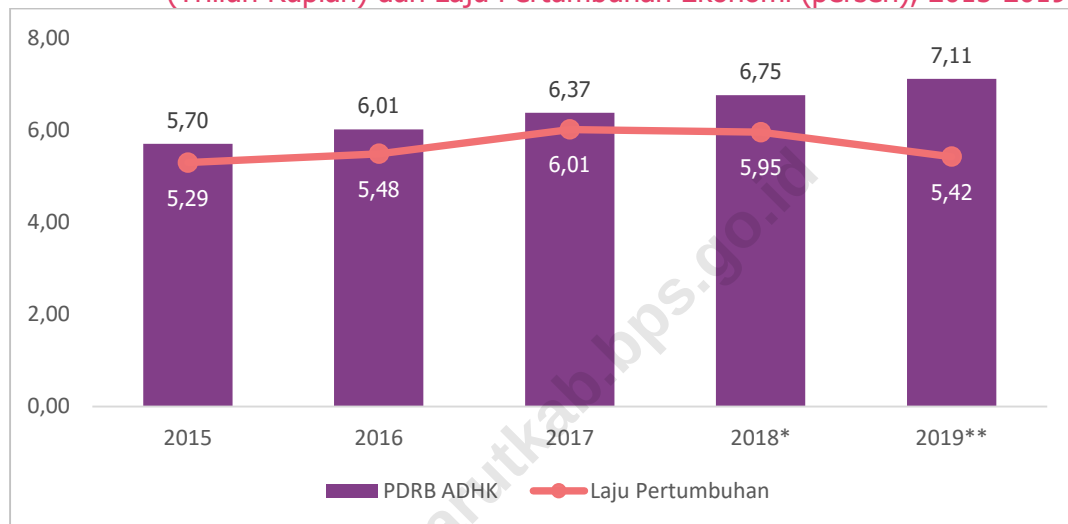
Aktivitas Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. PDRB menurut lapangan usaha menghitung PDRB dengan pendekatan produksi. Angka tersebut menggambarkan kemampuan dari berbagai sektor ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah di suatu wilayah.

Niai PDRB Kabupaten Barito Utara mengalami penambahan dari tahun ke tahun, khususnya dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7,11 triliun rupiah di tahun 2019, tumbuh sebesar 5,42 persen dari tahun 2018. Pertumbuhan

ekonomi yang positif ini mengindikasikan membaiknya perekonomian di Kabupaten Barito Utara, walaupun terjadi perlambatan dari tahun 2018 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,95 persen.

Gambar 3.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010:100 (Triliun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen), 2015-2019



Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019, BPS

Kategori ekonomi yang dominan memengaruhi perekonomian Kabupaten Barito Utara pada 2019 masih dipegang oleh kategori Pertambangan dan Penggalan yang menyumbang PDRB sebesar 41,24 persen atau sebesar 4,04 triliun Rupiah. Laju pertumbuhan kategori ini pada 2019 mencapai 5,23 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,49 persen. Hal ini salah satunya disebabkan karena turunnya harga batubara acuan (HBA) karena gejala over supply (berlebihnya stok batubara di pasar) yang dipengaruhi oleh pembatasan impor batubara dari Indonesia oleh China dan India. Penurunan permintaan batubara dari Eropa akibat berlarutnya perang dagang antara AS dan China berakibat pada penimbunan stok batubara.

Kategori lain yang juga memiliki andil besar dalam perekonomian Kabupaten Barito Utara adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang

berkontribusi sebesar 10,31 persen. Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2019 adalah sebesar 1,13 persen, melambat dari tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan kategori ini dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 dan menurunnya produksi kayu. Penurunan produksi tanaman pangan khususnya jagung akibat dari kemarau panjang pada 2019 juga berdampak pada pertumbuhan kategori ini.

Ketenagakerjaan

Perekonomian Kabupaten Barito Utara yang terus tumbuh tidak lepas dari peran masyarakat yang bekerja guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penduduk usia kerja, usia 15 tahun ke atas, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan dari 73,97 persen pada 2018 menjadi 69,79 persen pada 2019. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 69 sampai 70 penduduk yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pasokan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 3.3 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara, 2018-2019

Indikator	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Angkatan Kerja	69 145	65 932
Bekerja	66 146	63 346
Pengangguran	2 999	2 586
Bukan Angkatan Kerja	24 327	28 543
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)	73,97	69,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	4,34	3,92

Sumber: Barito Utara Dalam Angka 2019-2020, BPS

Penurunan TPAK Kabupaten Barito Utara ternyata searah dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Barito Utara pada 2019 mengalami penurunan dari 4,34 persen pada 2018 menjadi 3,92 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 3 sampai 4 penduduk yang menganggur dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. TPT ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Namun, penduduk yang menganggur ini termasuk di dalamnya orang yang bekerja di bawah jam kerja normal. Dengan kata lain, terdapat penduduk yang bekerja namun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu.

Kesenjangan Pendapatan dan Konsumsi

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat pemerataan pendapatan adalah distribusi pendapatan yang dilihat melalui pendekatan pengeluaran per kapita. Indikator ini melihat apakah masyarakat menikmati hasil pembangunan dilihat dari golongan pengeluarannya. Pada 2019, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Kabupaten Barito Utara adalah sebesar Rp1.126.875, sedangkan persentase penduduk terbanyak pada golongan pengeluaran Rp500.000 sampai Rp749.999 ke atas yaitu sebesar 30,31 persen.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2019

Golongan Pengeluaran (Rupiah)	Persentase Penduduk
(1)	(2)
< 150 000	0,00
150 000 – 199 999	0,00
200 000 – 299 999	0,09
300 000 – 499 999	6,36
500 000 – 749 999	30,31
750 000 – 999 999	20,65
1 000 000 – 1 499 999	21,12
1 500 000+	21,47
Jumlah	100,00

Sumber: Barito Utara Dalam Angka 2020, BPS

Bab 4

Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Utara

IPM 2019 70,52 status 'tinggi'

Harapan Lama Sekolah

12,48
tahun

Umur Harapan Hidup saat lahir

71,29
tahun

Rata-rata Lama Sekolah

8,60
tahun

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan

10,01
juta Rupiah/tahun

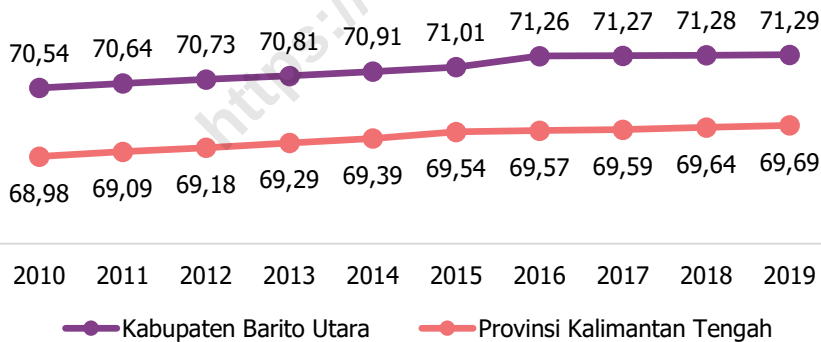


PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BARITO UTARA

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakilkan oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Kondisi UHH saat lahir di Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan, walaupun selama empat tahun terakhir peningkatannya hanya 0,01 di tiap tahunnya. Pada 2019, UHH saat lahir mencapai 71,29 tahun, meningkat 0,01 poin atau tumbuh sebesar 0,01 persen dari tahun 2018. Hal ini berarti bahwa rata-rata bayi yang baru lahir pada 2019 di Kabupaten Barito Utara memiliki peluang untuk hidup hingga usia 71,29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Barito Utara, baik dari sisi sarana dan prasarana kesehatan, akses, maupun kualitas pelayanan kesehatan.

Gambar 4.1 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun), 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

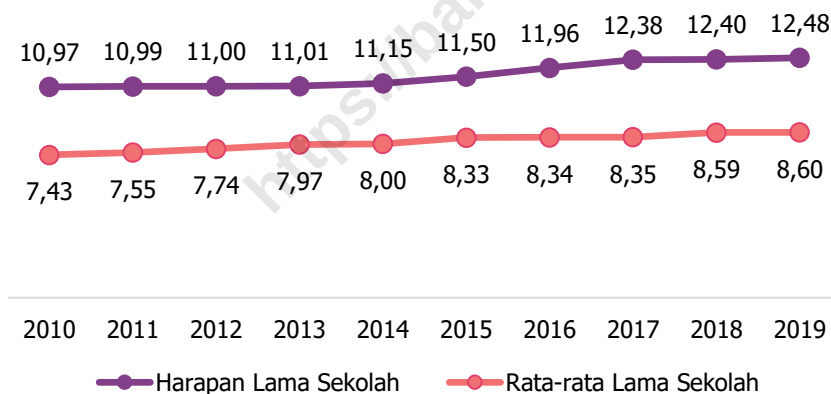
Peningkatan UHH saat lahir Kabupaten Barito Utara sejalan dengan peningkatan UHH saat lahir Provinsi Kalimantan Tengah. UHH saat lahir Provinsi Kalimantan Tengah pada 2019 adalah 69,69 tahun, tumbuh sebesar 0,07 persen dari tahun 2018. Peningkatan yang terjadi setiap tahunnya ini diharapkan akan terus dipertahankan sebagai indikator terjadinya perbaikan di berbagai sisi pada

bidang kesehatan, baik di Kabupaten Barito Utara maupun Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan untuk mendukung pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator penyusun dimensi pengetahuan tersebut sama-sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019, angka HLS sebesar 12,48 tahun yang berarti bahwa untuk anak yang berusia 7 tahun ke atas diharapkan mampu bersekolah hingga 12,48 tahun atau tamat SMA. Angka ini meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 12,40 tahun atau tumbuh sebesar 0,64 persen.

Gambar 4.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara (Tahun), 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

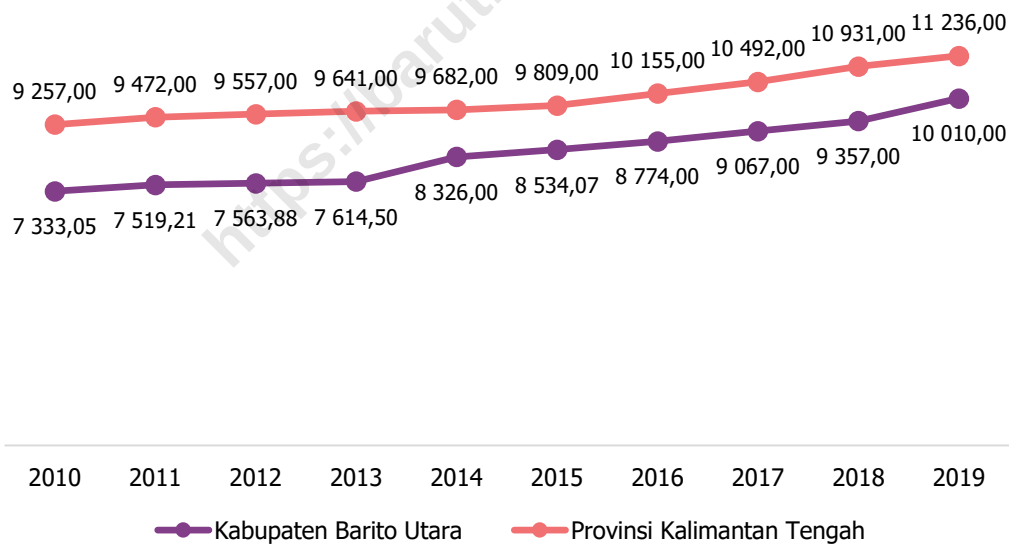
Sementara itu, RLS mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada HLS, yaitu sebesar 0,12 persen. Pada 2019, angka RLS mencapai 8,60 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menyelesaikan sekolah hingga 8,60 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas 2 SMP). Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Barito Utara putus sekolah bahkan

sebelum menamatkan SMP. Angka tersebut masih jauh di bawah program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 tahun atau hingga tamat SMA.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Barito Utara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 2010 hingga 2019. Pada 2019, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai angka 10,0 juta Rupiah per tahun atau mengalami kenaikan sebesar 6,98 persen. Pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan.

Gambar 4.3 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah/Tahun), 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

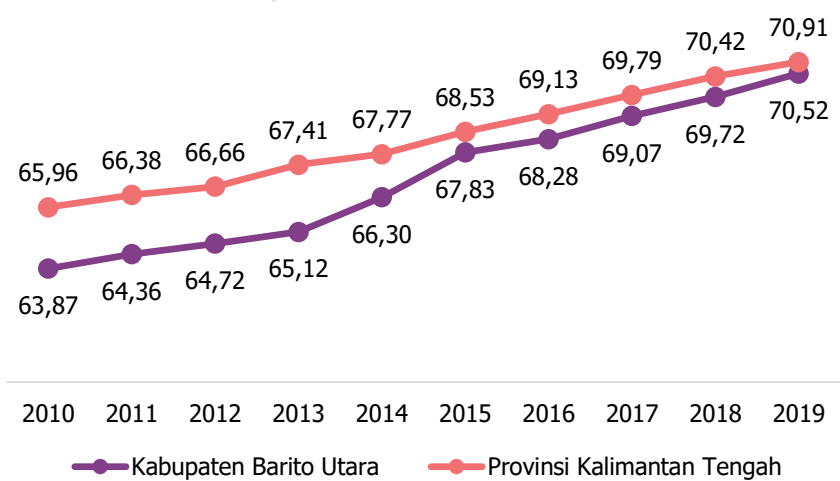
Sementara itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sebesar 2,79 persen pada 2019 menjadi 11,2 juta Rupiah per tahun. Terjadinya pertumbuhan yang positif ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Barito Utara dan

Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan semakin membaik. Hal ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan penduduk dari segi ekonomi ke posisi yang lebih baik atau dengan kata lain, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang terjadi pada 2019 adalah sebesar 1,15 persen sehingga mencapai angka IPM 70,52. Angka IPM 2019 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara telah mengalami kenaikan level pencapaian pembangunan manusia, yaitu dari status ‘sedang’ pada 2018 menjadi status ‘tinggi’ pada 2019. Selain itu, kemajuan yang terjadi secara bertahap dibuktikan pada pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2010 sampai 2019 yang telah mengalami peningkatan sebesar 10,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara terus melakukan perbaikan demi kesejahteraan penduduk khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusianya.

Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utara seiring dengan peningkatan pembangunan manusia yang juga terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2019, IPM Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 0,70 persen menjadi 70,91. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mampu mempertahankan level pembangunan manusianya pada status IPM 'tinggi'. Ini diharapkan menjadi motivasi bagi Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota di dalamnya untuk terus melakukan perbaikan dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Perbedaan yang tipis tidak hanya terjadi pada angka IPM antara Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk indikator-indikator penyusun angka IPM juga serupa. Untuk indikator Umur Harapan Hidup saat lahir dan Rata-rata Lama Sekolah, angka Kabupaten Barito Utara lebih besar daripada Provinsi Kalimantan Tengah. Pertumbuhan IPM yang positif menunjukkan bahwa baik Kabupaten Barito Utara maupun Provinsi Kalimantan Tengah secara umum terus melakukan upaya perbaikan kualitas hidup penduduknya.

Tabel 4.1 IPM Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah beserta Komponennya, 2019

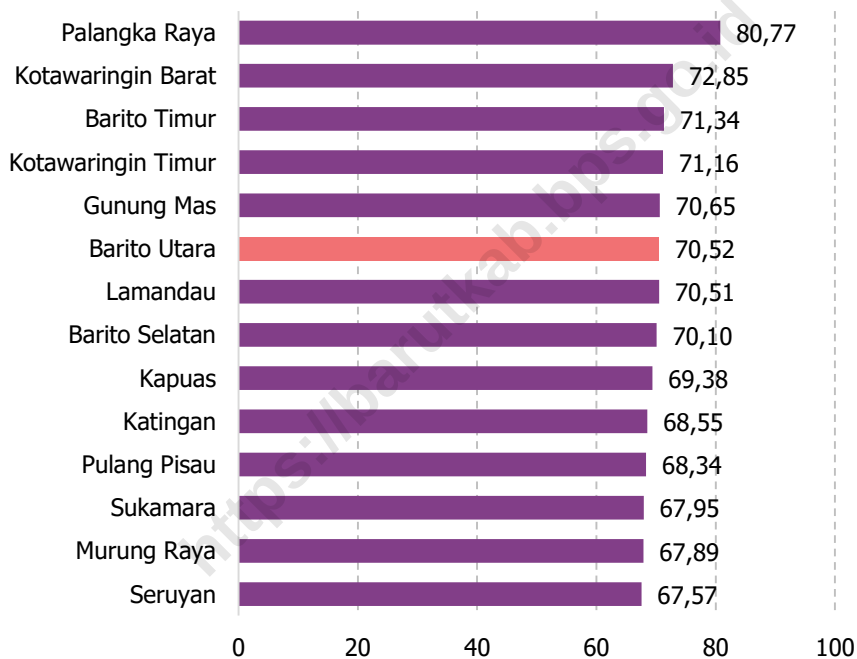
Komponen	Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
UHH (tahun)	71,29	69,69
HLS (tahun)	12,48	12,57
RLS (tahun)	8,60	8,51
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu Rupiah/tahun)	10 010	11 236
Pertumbuhan 2018-2019 (persen)	1,15	0,70
IPM	70,52	70,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Jika melihat seluruh capaian IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, hanya Kota Palangka Raya memegang status 'sangat tinggi' dengan IPM 80,77. Kabupaten yang berstatus 'tinggi' yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan IPM 72,85, Barito Timur dengan IPM 71,34, Kotawaringin Timur dengan IPM 71,16,

Kabupaten Gunung Mas dengan IPM 70,65, Kabupaten Barito Utara dengan IPM 70,52, Kabupaten Lamandau dengan IPM 70,51, dan Kabupaten Barito Selatan dengan IPM 70,10. Untuk Kabupaten Barito Utara, Lamandau, dan Barito Selatan, baru pada tahun 2019 mereka menyandang status IPM 'tinggi'. Sementara itu, kabupaten lainnya sebanyak 6 kabupaten masih dengan status 'sedang'.

Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan angka IPM pada 2019, tidak terkecuali Kabupaten Barito Utara. IPM Kabupaten Barito Utara yang sebesar 70,52 berada di antara Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lamandau. Pertumbuhan IPM Kabupaten Barito Utara sendiri menjadi tertinggi ketiga yaitu sebesar 1,15 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pertama disandang oleh Kabupaten Pulang Pisau dengan pertumbuhan IPM 1,18 persen dan diikuti Kabupaten Lamandau dengan pertumbuhan IPM 1,16 persen.

Bab 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

Harapan Lama Sekolah

12,57
tahun

Rata-rata Lama Sekolah

8,51
tahun



Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan

11,24
juta rupiah/tahun



Umur Harapan Hidup saat lahir

69,69
tahun

IPM 2019
Kalimantan Tengah

70,91

berstatus
TINGGI

TIGA KABUPATEN/KOTA
DENGAN PERTUMBUHAN IPM
TERBESAR DI KALIMANTAN
TENGAH (PERSEN)

Lamandau
1,16

Pulang Pisau
1,18

Barito Utara
1,15

2

1

3

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pengamatan yang dilakukan pada Indeks Pembangunan Manusia 2019 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,15 persen hingga mencapai angka IPM 70,52. Dengan angka IPM tersebut, Kabupaten Barito Utara berada pada status 'tinggi'.
- Peningkatan juga terjadi pada komponen-komponen penyusun IPM Kabupaten Barito Utara 2019 seperti:
 - Angka Harapan Hidup saat lahir meningkat sebesar 0,01 persen hingga mencapai 71,29 tahun.
 - Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat 0,64 persen hingga mencapai 12,48 tahun atau setara dengan tamat SMA. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) meningkat 0,12 persen hingga mencapai 8,60 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas 2 SMP).
 - Pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami peningkatan sebesar 6,98 persen hingga mencapai 10,01 juta Rupiah per tahun.
- IPM Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,70 persen hingga mencapai angka IPM 70,91 dengan status 'tinggi'.
- Peningkatan IPM Kabupaten Barito Utara tahun 2019 menjadi yang tertinggi ketiga yaitu sebesar 1,15 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pertama disandang oleh Kabupaten Pulang Pisau dengan pertumbuhan IPM 1,18 persen dan diikuti Kabupaten Lamandau dengan pertumbuhan IPM 1,16 persen.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan IPM adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu memacu laju pertumbuhan indeks komponen penyusun IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.
2. Indikator penyusun indeks kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan indeks kesehatan, dapat ditempuh melalui perbaikan derajat kesehatan masyarakat/penduduknya. Teori H. L. Blum menyatakan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40 persen faktor lingkungan, 30 persen faktor perilaku, 20 persen faktor pelayanan kesehatan, dan 10 persen faktor genetika atau keturunan (Menteri Kesehatan RI dalam Rakernas Indonesia Bersih, 21 Februari 2019). Hasil Susenas tahun 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Barito Utara masih terdapat 16,75 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (turun dari 24,01 persen pada 2018) dan 36,31 persen rumah tangga yang sumber air utamanya tidak terlindungi (sumur/mata air tidak terlindungi, air permukaan, air hujan, dll; naik dari 29,99 persen pada 2018). Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena faktor lingkungan, seperti kondisi perumahan, berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan suatu daerah.
3. Indikator penyusun indeks pendidikan adalah indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan indeks Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kabupaten Barito Utara pada 2019 baru mencapai 8,60 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas 2 SMP). Hal ini sejalan dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Barito Utara tahun 2019 yang hanya mencapai 84,73 persen pada jenjang pendidikan SMP dan 63,20 persen pada jenjang pendidikan SMA. Hal ini berarti masih banyak penduduk yang menunda bersekolah, tidak naik kelas, lulus lebih cepat, atau berhenti bersekolah.

Bahkan, jumlahnya semakin banyak seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Perlunya peningkatan kesadaran pendidikan di masyarakat masih perlu digalakkan. Perluasan pemberian program pendidikan yang menjangkau seluruh penjuru wilayah juga perlu digalakkan agar tidak ada masyarakat yang menunda bersekolah ataupun putus sekolah.

4. Di bidang pendidikan, pada tahun ajaran 2019/2020, terjadi penurunan rasio guru-murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP, yaitu menjadi 9 dan 11. Dengan kata lain, seorang guru mengajar atau mendidik sebanyak 9 orang murid pada jenjang SD dan 11 orang murid pada jenjang SMP. Indikator rasio murid-guru dapat menggambarkan beban kerja yang diemban seorang guru dalam mengajar dan mendidik serta menggambarkan mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar beban seorang guru dalam melakukan pengajaran dan pengawasan terhadap murid sehingga mutu pengajaran akan semakin rendah. Di sisi lain, terjadi kenaikan rasio guru-sekolah di semua jenjang pendidikan, yaitu 11 pada jenjang SD, 16 di jenjang SMP, dan 23 di jenjang SMA. Rasio guru-sekolah dapat digunakan untuk melihat apakah terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga pengajar di sekolah pada suatu daerah. Semakin rendah nilai rasio, semakin terbatas jumlah tenaga pengajar. Pemerataan guru baik secara kuantitas maupun kualitas di seluruh sarana pendidikan di Kabupaten Barito Utara perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi mutu pengajaran yang semakin rendah maupun terjadinya kekurangan tenaga pengajar.
5. Indikator penyusun indeks pengeluaran adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tahun 2019 Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 10,01 juta Rupiah per tahun. Kondisi perlu diperbaiki dengan melakukan dukungan kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur desa.

Infrastruktur yang baik dan memadai dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perbaikan infrastruktur yang dapat ditingkatkan seperti perbaikan jalan dan jaringan listrik.

<https://barutkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Barito Utara. *Barito Utara Dalam Angka 2020*. Muara Teweh: 2020

—. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Utara 2019*. Muara Teweh: BPS, 2019

—. *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara 2019*. Muara Teweh: BPS, 2020

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. *Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia 2019, No. 220/03/62 Tahun XIV, 22 Maret 2020*. Palangka Raya: 2020

—. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2019*. Palangka Raya: 2019

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Derajat Kesehatan 40% Dipengaruhi Lingkungan*. Jakarta: Kemenkes, 2019
<<http://www.depkes.go.id/article/view/19022200002/derajat-kesehatan-40-dipengaruhi-lingkungan.html>>

"Indeks Pembangunan Manusia" 2020. *Badan Pusat Statistik*.
<<http://ipm.bps.go.id/>>

"Sistem Informasi Rujukan Statistik" 2020. *Badan Pusat Statistik*.
<<http://sirusa.bps.go.id/>>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Utara, 2018-2019

Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Tidak mempunyai ijazah	10,47	11,96
SD/MI	33,56	27,81
SMP/MTs	23,30	24,67
SMA/MA	19,95	23,18
SMK/MAK	2,78	3,64
Diploma I/II	0,52	0,19
Akademisi/D3	3,02	2,72
Diploma IV/S1/S2/S3	6,04	5,82

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2018-2019, BPS

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015–2019

Kategori	Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	833 540,1	894 961,2	945 585,3	975 325,8	1 010 267,0
B	Pertambangan dan Penggalian	2 811 331,7	3 066 334,5	3 514 266,4	3 990 441,9	4 042 034,5
C	Industri Pengolahan	569 015,2	634 611,0	717 724,5	755 886,4	823 700,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2 031,8	2 425,1	2 989,5	3 566,8	4 296,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10 152,7	11 124,5	12 098,4	13 516,1	14 967,2
F	Konstruksi	373 755,0	412 058,8	457 052,3	518 368,0	572 981,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	386 262,7	444 559,0	507 514,2	587 215,5	662 491,0
H	Transportasi dan Pergudangan	387 921,2	424 196,1	480 586,8	564 907,6	652 955,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99 545,0	115 630,6	128 070,6	143 518,1	160 499,1
J	Informasi dan Komunikasi	72 331,2	79 112,8	86 609,4	93 896,7	102 126,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121 032,6	129 619,0	142 757,1	153 788,1	166 00,6
L	Real Estat	109 435,4	119 568,2	131 985,8	150 252,1	167 919,1
M,N	Jasa Perusahaan	836,5	929,7	1 020,0	1 153,9	1 267,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373 916,0	393 060,6	429 267,3	475 987,7	524 225,7
P	Jasa Pendidikan	318 911,8	360 106,2	396 032,7	450 080,5	506 672,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146 911,9	165 381,0	183 506,4	211 624,7	243 253,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	91 156,1	105 130,7	117 757,4	131 179,3	146 087,7
Produk Domestik Regional Bruto		6 708 086,8	7 358 808,9	8 254 824,0	9 220 709,1	9 800 744,1

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha, 2015–2019, BPS

Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015–2019

Kategori	Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	603 763,9	622 465,1	642 517,1	661 681,1	669 139,9
B	Pertambangan dan Penggalian	2 867 876,8	3 037 951,2	3 225 366,3	3 402 558,0	3 580 411,2
C	Industri Pengolahan	403 760,6	427 223,8	457 295,0	489 981,9	527 970,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1 911,9	2 189,3	2 456,1	2 765,8	3 135,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7 426,2	7 842,5	8 176,1	8 604,6	9 119,6
F	Konstruksi	264 078,6	276 358,2	291 395,5	305 702,9	320 987,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	292 768,2	310 176,7	333 830,6	363 024,1	388 614,2
H	Transportasi dan Pergudangan	287 081,5	304 548,5	327 955,5	356 134,6	384 262,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70 702,6	76 288,1	82 817,6	89 683,0	96 314,3
J	Informasi dan Komunikasi	67 362,8	71 647,1	75 825,9	80 539,3	84 852,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	88 439,7	93 758,9	98 933,9	102 391,8	105 747,8
L	Real Estat	79 074,1	83 790,5	89 470,9	95 570,6	100 614,1
M,N	Jasa Perusahaan	620,7	658,7	700,9	754,0	794,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	262 837,6	268 809,3	280 033,9	297 367,4	312 779,6
P	Jasa Pendidikan	228 454,6	242 741,7	259 040,7	280 142,2	301 349,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102 862,3	109 720,4	117 792,5	127 930,4	139 230,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	67 512,6	72 407,2	77 519,0	83 764,8	89 172,0
Produk Domestik Regional Bruto		5 696 534,6	6 008 577,3	6 369 617,4	6 748 596,7	7 114 495,9

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha, 2015–2019, BPS

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

Kategori	Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,43	12,16	11,45	10,58	10,31
B	Pertambangan dan Penggalan	41,91	41,67	42,57	43,28	41,24
C	Industri Pengolahan	8,48	8,62	8,69	8,20	8,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
F	Konstruksi	5,57	5,60	5,54	5,62	5,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	6,04	6,15	6,37	6,76
H	Transportasi dan Pergudangan	5,78	5,76	5,82	6,13	6,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,57	1,55	1,56	1,64
J	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,08	1,05	1,02	1,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,80	1,76	1,73	1,67	1,69
L	Real Estat	1,63	1,62	1,60	1,63	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,34	5,20	5,16	5,35
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,89	4,80	4,88	5,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,19	2,25	2,22	2,30	2,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,36	1,43	1,43	1,42	1,49
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019, BPS

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015–2019

Kategori	Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,64	3,10	3,22	2,98	1,13
B	Pertambangan dan Penggalian	3,71	5,93	6,17	5,49	5,23
C	Industri Pengolahan	6,40	5,81	7,04	7,15	7,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,52	14,51	12,18	12,61	13,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,81	5,61	4,25	5,24	5,99
F	Konstruksi	7,44	4,65	5,44	4,91	5,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42	5,95	7,13	9,25	7,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,83	6,08	7,70	8,58	7,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,61	7,90	8,56	8,29	7,39
J	Informasi dan Komunikasi	8,27	6,36	5,83	6,22	5,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	6,01	5,52	3,50	3,28
L	Real Estat	6,29	5,96	6,78	6,82	5,28
M,N	Jasa Perusahaan	6,97	6,13	6,40	7,59	5,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,51	2,27	4,18	6,19	5,18
P	Jasa Pendidikan	6,80	6,25	6,71	8,15	7,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	6,67	7,36	8,61	8,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,50	7,25	7,06	8,06	6,46
Produk Domestik Regional Bruto		5,29	5,48	6,01	5,95	5,42

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019, BPS

Lampiran 6. Angka Harapan Hidup saat Lahir Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Tahun), 2010-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup	
	Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
2010	70,54	68,98
2011	70,64	69,09
2012	70,73	69,18
2013	70,81	69,29
2014	70,91	69,39
2015	71,01	69,54
2016	71,26	69,57
2017	71,27	69,59
2018	71,28	69,64
2019	71,29	69,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 7. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara (Tahun), 2010-2019

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)	(3)
2010	10,97	7,43
2011	10,99	7,55
2012	11,00	7,74
2013	11,01	7,97
2014	11,15	8,00
2015	11,50	8,33
2016	11,96	8,34
2017	12,38	8,35
2018	12,40	8,59
2019	12,48	8,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 8. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah/Tahun), 2010-2019

Tahun	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	
	Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
2010	7 333,05	9 257,00
2011	7 519,21	9 472,00
2012	7 563,88	9 557,00
2013	7 614,50	9 641,00
2014	8 326,00	9 682,00
2015	8 534,07	9 809,00
2016	8 774,00	10 155,00
2017	9 067,00	10 492,00
2018	9 357,00	10 931,00
2019	10 010,00	11 236,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 9. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2010-2019

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kotawaringin Barat	68,43	68,53	68,63	69,51	70,41	70,60	71,13	72,11	72,46	72,85
Kotawaringin Timur	65,24	65,60	66,61	67,95	68,45	68,61	69,42	70,17	70,56	71,16
Kapuas	63,32	64,01	64,38	64,82	65,29	66,07	66,98	68,04	68,68	69,38
Barito Selatan	64,51	65,10	65,76	66,20	66,61	68,27	69,00	69,25	69,73	70,10
Barito Utara	63,87	64,36	64,72	65,12	66,30	67,83	68,28	69,07	69,72	70,52
Sukamara	62,41	62,86	63,52	63,92	64,44	65,80	66,40	66,98	67,52	67,95
Lamandau	65,32	65,99	66,49	67,23	67,53	68,30	68,54	69,17	69,70	70,51
Seruyan	61,60	62,16	62,39	62,81	63,49	64,77	65,40	66,14	67,04	67,57
Katingan	63,25	64,54	64,87	65,29	65,79	66,81	67,41	67,56	67,91	68,55
Pulang Pisau	63,76	64,06	64,28	64,76	65,00	65,76	66,49	67,00	67,54	68,34
Gunung Mas	66,33	66,85	67,30	67,75	68,13	69,24	69,73	69,95	70,23	70,65
Barito Timur	66,76	67,31	67,97	68,82	69,12	69,71	70,33	70,57	70,82	71,34
Murung Raya	63,18	64,39	64,85	65,62	66,10	66,46	66,96	67,16	67,56	67,89
Palangka Raya	76,53	76,98	77,40	78,02	78,50	78,62	79,21	79,69	80,34	80,77
Provinsi Kalimantan Tengah	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah



**Sensus
Penduduk
2020**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BARITO UTARA***

Jl. Jendral A. Yani No. 143 Muara Teweh 73811
Telp. (0519) 21070, Fax. (0519) 24715
Web. <http://www.barutkab.bps.go.id>, e-mail. bps6205@bps.go.id

ISBN 978-602-6527-42-4



9 786026 527424